

BAB IV

BENTUK PERAN POLITIK NU DAN IMPLIKASINYA

A. Peran Politik NU Dalam Masyumi

Keberadaan Masyumi tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) yang telah ada sejak tahun 1937, sebagai badan federasi umat Islam. Akan tetapi keberadaan MIAI pada masa pendudukan Jepang, sebenarnya hanya sebagai jembatan penghubung antara basis-basis umat Islam dengan pihak Jepang. Namun setelah Jepang berhasil membangun kontak langsung dengan umat Islam, MIAI tidak pernah lagi diajak bicara dalam mengatasi persoalan-persoalan Islam di Indonesia.⁸²

Menyadari posisinya tidak menguntungkan lagi, para pemimpin MIAI berusaha mengembalikan fungsi MIAI sebagai alat perjuangan umat Islam. Para pengurus MIAI berusaha untuk menyesuaikan konstitusi MIAI dengan kebutuhan dan tuntunan zaman.⁸³

Jepang melihat kondisi MIAI yang tidak lagi menguntungkan bagi pemerintahnya, maka Jepang segera memberikan pengakuan hukum secara resmi kepada dua organisasi besar yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan yaitu NU yang beraliran tradisional dan Muhammadiyah yang beraliran modern. Tidak sampai enam minggu setelah pengakuan diberikan kepada kedua organisasi tersebut, para pengurus MIAI diberi

⁸²Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Salamadani, Bandung, 2010, Hlm. 531.

⁸³Zainul Milal Bizawie, *Laskar Ulama Santri dan Resolusi Jihad*, Pustaka Compass, Tangerang, 2014, Hlm. 103.

izin untuk melakukan pertemuan pada tanggal 28 Oktober 1943. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang pertama dan terakhir sebelum MIAI sebagai badan federasi dibubarkan. Dan sejak saat itu umat Islam Indonesia secara menyeluruh dibawah komando pemerintah Jepang.⁸⁴

Berakhirnya MIAI sebagai badan federasi umat Islam, semakin memantapkan posisi Jepang dalam memobilisasi umat Islam. Kedua organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yang sebelumnya mendapat legitimasi untuk melakukan aktifitas keagamaan, oleh Jepang motor penggerak dalam federasi yang dibentuk oleh Jepang.

Dalam rangka kerjasama dengan Jepang, umat Islam baik dari NU maupun Muhammadiyah berhasil mengadakan kontak langsung untuk membangun organisasi baru. Hal ini dilakukan setelah gagal mempertahankan MIAI pada waktu itu Jepang meresmikan pembentukan tentara PETA dengan corak keislaman,⁸⁵ ini dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk menghadapi perang melawan sekutu serta dalam rangka memenangkan perang Asia Timur Raya. Sebagai pengganti MIAI yang telah dibubarkan, pada akhir Oktober 1943 atas prakasa NU dan Muhammadiyah berhasil membentuk wadah baru yang diberi nama Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia). Masyumi baru mendapatkan status hukum pada bulan november 1943, yang mempunyai tujuan untuk

⁸⁴Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun; Indonesian islam Under The Japanese Occupation 1942-1945*, diterjemahkan. Daniel Dakhidae, *Bulan Sabit dan Matahari Ternit; Islam Indonesia pada masa Pendudukan Jepang*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1980, Hlm. 50-51.

⁸⁵Zainul Milal Bizawie, *Op. Cit*, Hlm. 125.

memperkuat persatuan seluruh organisasi umat Islam dalam membantu Dai Nippon demi kemenangannya.⁸⁶

Lahirnya Masyumi merupakan lembaran baru bagi kehidupan umat Islam dimasa penjajahan. Jepang melarang masyumi melakukan aktifitas politik, akan tetapi tidak sedikit para pemimpin umat Islam yang memegang jabatan politis pada masa tersebut.⁸⁷ Keadaan yang sedemikian ini belum pernah terjadi pada masa penjajahan belanda, hal ini dikarenakan belanda saat itu lebih dekat dengan para tokoh nasionalis sekuler dan kebangsaan dari pada terhadap para tokoh agama Islam.

Keanggotaan Masyumi sendiri nampaknya tertutup bagi kalangan nasionalis kebangsaan.⁸⁸ Walaupun secara organisasi anggota masyumi terbuka bagi semua organisasi Islam dan para ulama, namun apabila organisasi maupun perseorangan ingin masuk menjadi anggota Masyumi terlebih dahulu harus mendapat legitimasi dari pemerintah Jepang sedangkan para ulam harus mendapatkan persetujuan dari shumubu terlebih dahulu jika hendak menjadi anggota. Kepengurusan Masyumi secara eksklusif diangkat dari pemimpin kedua organisasi NU dan Muhammadiyah, pemimpin tertingginya adalah K. H. Hasyim Asy'ari ada wakilnya Mas Mansur dan K. H. A. Wahid Hasyim (NU) terpilihnya K. H. Hasyim Asy'ari sebagai pucuk pimpinan Masyumi membuktikan NU

⁸⁶Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdhotul Ulama*, Jatayu, Solo, 1985, Hlm. 110.

⁸⁷Harry J. Benda, *Op. Cit*, 186.

⁸⁸Ibid, Hlm 185

mempunyai peranan penting dalam politik sejak awal pembentukannya sampai aktivitas-aktivitas perjuangannya.⁸⁹

Diplomasi para ulama ternyata mampu meyakinkan Jepang dengan diserahkannya kepemimpinan *Shumubu* (KUA pusat) kepada K. H. Hasyim Asy'ari *Shumubu* juga mendirikan kantor-kantor cabang di daerah yang bernama *Shumuka*, yang sebagian besar di pimpin oleh ulama NU ditingkat daerah meskipun k. H. Hasyim Asy'ari sebagai pimpinan tertinggi Masyumi dan Shumubu, akan tetapi beliau tetap tinggal di Jombang untuk mengurus.

Pesantrennya kemudian untuk menjalankan aktivitas sehari-hari Masyumi, pimpinan *Shumubu* dipercayakan kepada K. H. Abdul Wahid Hasyim.

Pada masa Jepang, Masyumi memperhatikan gerakan 3 A, yaitu sebuah badan untuk menghimpun tenaga pimpinan Indonesia dalam membantu perang Asia Timur Raya. Kemudian badan itu berubah menjadi PUTERA dan tahun 1944 berubah lagi menjadi "*Java Hokokai*" dalam *Java Hokokai* ini, pimpinan Masyumi didudukkan sebagai penasehat utama (*Komon*) bagi Gunseikan, bersama tokoh nasionalis Ir. Soekarno.⁹⁰ Dengan dibentuknya Java Hokokai ini K. H. A. Wahid Hasyim selalu menyampaikan berita kepada seluruh cabang NU melalui Saiffuddin Zuhri hal itu seperti diceritakan sebagai berikut:

⁸⁹Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi, relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, Lkis, Yogyakarta, 1994, Hlm. 55.

⁹⁰Choirul Anam, *Op. Cit*, 118.

“bahwa K. H. A. Wahid Hasyim selalu memberitahukan “Java Hokokai” itu hanya untuk kepentingan Jepang dalam mempertahankan perang Asia Timur Raya. Tidak pernah terlintas sedikitpun dalam benak Jepang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kemerdekaan tergantung kepada bangsa Indonesia sendiri. Karena itu kita perlu ingat pada sabda nabi ‘*Al-Harbu Hid’ah*’ (peperangan selamanya penuh tipu muslihat). Harus kita pergunakan akal cerdas untuk melabui Jepang guna tercapainya kemenangan akhir bagi bangsa Indonesia”.⁹¹

Karena Jepang mengabdikan keinginan para pemimpin nasionalis lewat Java Hokokai membentuk tentara PETA. Maka NU mendesak Jepang supaya mendidik para pemuda dalam bidang kemiliteran. Kemudian lahirlah tentara santri yang dikenal dengan nama *Hisbullah* (tentara Allah) yang penyelenggaraannya dikelola oleh Masyumi melalui K. H. Saifuddin Zuhri, informasi tersebut segera disampaikan keseluruh pesantren dan pimpinan setinggi tentara Hisbullah diserahkan kepada Zainal Arifin dari NU.⁹²

Pada tahun 1942-1945, terdapat dua belah lembaga Masyumi yaitu, Masyumi bentukan pemerintah Jepang dan Masyumi yang didirikan oleh orang Indonesia setelah kemerdekaan. Perjuangan NU tidak hanya pada Masyumi masa Jepang, tetapi NU juga aktif dalam Masyumi masa kemerdekaan dalam perjuangan kemerdekaan.

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid*, Hlm. 115.

Selain berhasil membentuk tentara hisbullah, NU melalui masyumi juga berhasil mendirikan sekolah tinggi islam untuk menyiapkan kader pemimpin-pemimpin islam yang tangguh dan mempunyai semangat juang yang tinggi dalam menghadapi kolonialisme penjajahan. Pendirian sekolah tinggi islam ini bertujuan untuk mendidik dan mengarahkan guna persiapan kemerdekaan kelak nanti. Dari sinilah nampak bahwa NU yang dicap sebagai organisasi orang bersarung dan kolot ternyata mampu terjun dan aktif didalam kepengurusan Masyumi, hal ini terbukti dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh K. H. A. Wahid Hasyim dan beberapa tokoh NU yang terlibat didalamnya.

B. Partisipasi NU dalam Pembentukan Tentara PETA dan Hisbullah

Pembela Tanah Air (PETA) adalah merupakan pasukan sukarela yang bertugas mengamankan daerah sendiri dari serangan musuh. PETA terbentuk atas usulan para kaum nasionalis sekuler dengan sepengetahuan para pemimpin Islam, agar pemuda-pemuda Indonesia diberi latihan militer. Karena pada saat itu dalam keadaan perang dan pada kenyataanya tentara Jepang mengalami kemunduran di negara-negara Asia yang didudukinya dalam menghadapi tentara sekutu. Maka permintaan para ulama tersebut dikabulkan oleh pemerintah Jepang dengan anggapan bahwa pembentukan tentara PETA adalah untuk menyambut semangat yang berkobar-kobar dan memenuhi keinginan penduduk asli Jawa untuk

membela tanah airnya maka pembentukan PETA atas dasar membela Asia Timur Raya bersama-sama.⁹³

Sebagai realisasi dari pembentuka PETA, komandan Batalyon (*Daidanconya*) banyak direkrut oleh Jepang dari kalangan ulama dan tokoh politik Islam. Hal ini sengaja dilakukan karena mereka mempunyai keyakinan yang kuat bahwa tentara sekutu akan banyak menjumpai kesulitan jika rakyat Indonesia membantu tujuan perangnya. Sebab dalam kenyataan sosial bahwa pengaruh ulama dan kyai sangat besar di masyarakat karena pandangan tersebut akhirnya Jepang berkenan membentuk tentara tanah air.

Untuk memperoleh dukungan yang lebih kuat dari umat islam jepang membentuk tentara PETA dengan corak islam.

Pemerintah jepang sengaja membentuk tentara PETA bercorak islam daidan (batalyon) biasanya mempunyai mushola sendiri, dan menganjurkan anggotanya untuk sholat jum'at. Bahkan pada tunggul panji-panji PETA terlukis bulan bintang putih dalam bulatan matahari terbit lengkapa dengan sinarnya dengan latar belakang hijau. Para *Daidanco*, (komandan batalyon) terdiri dari para ulama. Juga di dalam kesatriaan didirikan langgar, hal ini untuk menghormati agama Islam. Kemudian panji-panji PETA bermotifkan Islam kemudian menetapkan

⁹³Priggodigdo dan Hasan Shadlily M. A, *Ensiklopedia Umum*, Kanisius, Yogyakarta, 1973, Hlm, 1009.

hari jum'at sebagai hari libur. Hal ini dilakukan oleh Jepang semata-mata untuk mendekati umat Islam.⁹⁴

Mengenai keikutsertaan NU dalam tentara PETA dapat dilihat dari permintaan pemerintah Jepang melalui Abdul Khamid Ono kepada K. H. A. Wahid Hasyim, agar para pemuda-pemuda Islam memasuki *Heiho* supaya dilatih dibidang kemiliteran, sebagai serdadu cadangan untuk dikirim ke medan perang mendampingi Jepang melawan sekutu di negara-negara Asia. Permintaan Jepang tersebut dapat diterima oleh K. H. A. Wahid Hasyim dengan syarat para pemuda-pemuda yang dilatih itu cukup bertugas mempertahankan tanah airnya sendiri dari serangan sekutu ia menyatakan:

“Saya katakan kepada Abul Hamid Ono, bahwa menghadapi kekuatan sekutu di medan perang harus di bebaskan kepada tentara yang sudah terlatih baik, yaitu tentara dai Nippon. Pemuda-pemuda kita yang baru dilatih kemiliteran mungkin akan menyulitkan tentara Jepang yang professional itu. Lain halnya dengan pertahanan di dalam negeri diserahkan kepada pemuda-pemuda kita, dengan demikian, putera-putera tanah air menjaga tanah airnya sendiri sedangkan serdadu-serdadu Jepang yang ada disini bisa dikirim kemedan perang menghadapi sekutu.”⁹⁵

Sebagai realisasi dari pembentukan PETA tersebut, maka orang-orang NU dikirim untuk masuk kedalamnya, yaitu Abdul Kholiq Hasyim (adik K. H. A. Wahid Hasyim) dilatih menjadi *Daidanco* (komandan batalyon), Wahid Wahab (putera K. H. Wahab Hasbullah) dilatih sebagai

⁹⁴Zainul Milal Bizawie, *Op. Cit*, Hlm. 135.

⁹⁵Syaifudin Zuhri, *Guruku Orang-orang dari Pesantren*, Lkis, Yogyakarta, 2003, Hlm.

Shodanco (komandan peleton). Iskandar Sulaiman (seorang konsul NU malang) sebagai *Daidanco* dan lain-lain.

Partisipasi NU dengan mengirimkan para anggotanya untuk diberi latihan militer, tidak hanya dalam tentara PETA, bahkan K. H. A. Wahid Hasyim mengusulkan kepada Abdul Hamid Ono agar pemuda-pemuda santrinya diberi pelatihan kemiliteran dengan membentuk tentara *Hisbullah* yang memiliki tugas sama dengan PETA.⁹⁶ Sebelum pembentukan *Hisbullah* para tokoh NU di antaranya, K. H. A. Wahab Hasbullah, K. H. A. Wahid Hasyim dan K. H. Zaenal Arifin terlebih dahulu mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh Indonesia lainnya, terutama pemimpin empat serangkai.⁹⁷

Sebenarnya pembentukan tentara *Hisbullah* semata-mata ide dari tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya, tapi bersama-sama dengan para ulama yang lain. Pencetus *Hisbullah* juga termasuk para ulama yang tergabung dalam Masyumi.⁹⁸ Karena itu setelah *Hisbullah* lahir, penyelenggaraan latihan dikelola oleh Masyumi dengan mengambil tempat di desa Cibarusa, Bekasi, sebagai pusat pelatihan. Jika latihan PETA dipimpin oleh opsir Jepang, Kapten Yanagawa yang cakap dan penuh disipliner, begitu juga dengan *Hisbullah* yang di pimpin oleh kapten

⁹⁶*Ibid*, Hlm. 179-180

⁹⁷*Ibid*, Hlm. 192-193

⁹⁸Zainul Milal Bizawie, *Op. Cit*, Hlm. 142.

Yanagawa juga. Maka dengan demikian *Hisbullah* dan PETA adalah saudara perjuangan satu guru.⁹⁹

Hisbullah sebagai realisasi dari badan Masyumi yang mengkoordinir para pemuda yang bergabung dalam NU, Muhammadiyah dan organisasi-organisasi lainnya untuk mengadakan latihan kemiliteran. Pada awal 1944 *Hisbullah*, telah terbentuk di seluruh Jawa, Madura, Sumatra, dan Sebagian daerah Kalimantan. Kalau para pemuda Islam yang mendapat latihan militer tergabung dalam *Hisbullah*, maka para kyai dan ulama membentuk pasukan yang diberi nama *Sabilillah*. Markas tertinggi *Sabilillah* terletak di Jakarta dengan panglima Zaenal Arifin. Sedangkan keanggotaan dari *Hisbullah* dan *Sabilillah* di ambil dari unsur NU, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Dengan demikian pesantren-pesantren dalam tempo yang relatif singkat telah berubah menjadi markas-markas *Hisbullah*, sekaligus tempat latihan. Sebagai akibat dari pelatihan kemiliteran yang dibentuk oleh Jepang yang tergabung dalam *Hisbullah* dan *Sabilillah*, ulamamemiliki pengalaman mengkonsolidasikan potensi umat Islam melalui organisasi militer.¹⁰⁰

Setelah kekuatan terbina baik melalui Masyumi, *Shumubu* dan *Hisbullah*, maka K. H. Wahid Hasyim pada janji kemerdekaan yang dipidatokan oleh perdana menteri Kunaiki Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Janji Jepang untuk memerdekakan di masa yang akan datang bagi

⁹⁹Syaifudin Zuhri, *Op. Cit.* Hlm. 129.

¹⁰⁰Ahmas Mansyur Suryanegara, *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Mizan, Bandung, 1995, Hlm. 32.

rakyat Indonesia cukup menarik perhatian para pemimpin Indonesia juga pemimpin dunia Islam. Karena itu Syekh Muhammad al-Amin al-Husaini seorang ketua kongres Muslimin waktu itu mengirim surat teguran kepada duta besar Jepang di Jerman. Kongres tersebut mengusahakan supaya Jepang segera memberi kemerdekaan kepada umat Islam, dan Perdana Menteri Kaiso berjanji akan mengusahakannya. Ternyata surat teguran tersebut juga diterima oleh K. H. A. Wahid Hasyim selaku pimpinann Masyumi. Maka pada tanggal 12 Oktober 1944 segera mengadakan rapat untuk membahas permasalahan itu.¹⁰¹ Ternyata janji Jepang hanya sekedar janji belaka. Ketika pada awal tahun 1945 aada berita tentang kekalahan Jepang atas sekutu, kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia yang tergabung dalam PETA dan Hisbullah untuk mengambil senjata perang Jepang.

K. H. A. Wahid Hasyim sebagai seorang tokoh NU , segera melakukan kontak dengan Jepang untuk mendesak Jepang untuk mewujudkan janjinya. Maka pada tanggal 29 April 1945 berhasil membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia) yang beranggotakan 62 orang termasuk K. H. A Wahid Hasyim.¹⁰²

¹⁰¹Choirul Anam, *Op. Cit.* 121

¹⁰²*Ibid.*

C. Dampak Peran Politik NU dan Implikasinya.

Sebagaimana diketahui bahwa peran politik yang dimainkan oleh Nahdhotul Ulama pada masa Pendudukan Jepang sedikit banyak telah membawa pengaruh signifikan bagi:

1. Nahdhotul Ulama (NU)

Pengaruh dari peran politik yang dilakukan oleh NU pada masa pendudukan Jepang bagi NU dalam bidang sosial adalah mulai terangkatnya posisi para kyai dan ulama dengan menduduki jabatan-jabatan politis dalam pemerintahan. Selain itu mereka memanfaatkan isu 'koolaborasi' untuk mengkonsolidasikan masyarakat desa untuk bekerja sama dengan Jepang sebaik mungkin.

Sedangkan dalam bidang politik dampak yang ditimbulkan sangat signifikan. Hal ini dikarenakan, NU yang sejak berdirinya, yakni tahun 1926 yang dikenal sebagai *Jam'iyah Diniyah Mahdloh* yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan, yang berkuat dengan dunia pesantren dan berada jauh dari pusat pemerintahan ternyata ketika Jepang datang dan menerapkan kebijakan *grass root policy* dan mereka ditarik pada garis depan untuk bekerja sama dengan Jepang, mereka mampu memanfaatkan situasi ini dengan sebaik mungkin. Dan bahkan para ulama dan kyai ini sudah terjun dalam dunia politis, yang tidak pernah disentuh sebelumnya.

Dengan demikian NU sebagai organisasi sosial-keagamaan yang pada masa penjajahan belanda selalu diremehkan dan dimarjinalkan baik oleh kalangan priyayi maupun kalangan nasionalis sekuler, tidak lagi bisa diremehkan begitu saja oleh mereka. Hal ini dikarenakan NU mempunyai *bargaining position* yang jelas dengan para penguasa Jepang. Akibat yang ditimbulkan dari kondisi diatas semakin membuka peluang kepada NU untuk bergerak diberbagai bidang untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas guna tercapainya kemerdekaan.

2. Umat Islam

NU pada awal didirikan bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan faham *Ahl Al-Sunnah Wal-Jama'ah*, namun dalam setiap pergerakannya tidak pernah lepas dari dimensi politis. Hal ini berhasil menjadikan NU sebagai kekuatan sosial-politik Islam yang diperhitungkan dalam pencatatan politik nasional. Sedangkan tradisi politik Sunni yang mengandung semangat rekonsiliasi dan toleransi telah memberikan ciri yang fleksibel dan kompromistis (*Middle Way*) dengan menerima tradisi lokal. Sikap yang fleksibel dan kompromistis tersebut sangat berguna ketika Jepang menerapkan *grass root policy* kepada para ulama dan kyai yang tinggal dipedesaan.

Ketika NU sudah mempunyai *bargaining position* yang jelas dengan pemerintah Jepang, saat itulah mereka menggunakan kesempatan untuk mempengaruhi dan memberika masukan kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan mengenai segala

permasalahan yang berkaitan dengan umat Islam Indonesia. Dengan diterimanya usulan-usulan dari NU tersebut, telah berhasil menghidupkan kembali organisasi- organisasi sosial-keagamaan yang sebelumnya dibekukan.

3. **Bangsa Indonesia**

Sikap kooperatif NU terhadap pemerintah Jepang strategi jangka panjang yang ditempuh untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, baik berupa sumberdaya manusia, diplomasi dalam pemerintahan dan menggalang kekuatan militer, semua itu dipersiapkan dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan.

Sebelum Jepang memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, sudah ada berita dari negara-negara Asia yang didudukinya bahwa “Jepang kalah dengan sekutu”. Maka dengan keadaan demikian NU mendesak pemerintah Jepang agar segera memberikan kemerdekaan.

Ketika NICA datang ke Indonesia yang dibocengi Belanda yang kemungkinan besar ingin menjajah kembali Indonesia, NU lewat tokohnya mengeluarkan serasih resolusi jihad. Resolusi jihad ini membangkitkan semangat politisme bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah didapatnya dari pemerintahan Jepang.